

**PENGARUH EFEKTIVITAS FUNGSI PENGAWASAN TERHADAP
KUALITAS LAPORAN KEUANGAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG PROVINSI SUMATERA BARAT**

*The Effectiveness Of Governments Oversight
On The Quality Of Financial Statements*

Yuli Dastuti; Salfadri; Dica Lady Silvera

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Univesitas Ekasakti

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh efektivitas pengawasan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah, sedangkan variabel independen dalam penelitian ini adalah efektivitas pengawasan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data angket (kuisisioner) yang disebar kepada responden atau karyawan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumbar. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear sederhana dan koefisien determinasi pada taraf signifikansi sebesar 5%. Program yang digunakan dalam menganalisis data SPSS versi 20. Sedangkan untuk hasil perbandingan nilai t_{hitung} dengan t_{tabel} variabel standar akuntansi pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan menunjukkan hasil t_{hitung} sebesar 9,166 dan t_{tabel} sebesar 2,059. Dari hasil pengujian tersebut $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($9,166 > 2,059$). Dari hasil pengujian tersebut $t_{hitung} < t_{tabel}$ yang berarti H_a diterima atau H_o ditolak. Dengan kata lain berdasarkan pengujian hipotesis menunjukkan bahwa efektivitas pengawasan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Kata Kunci : Efektivitas Pengawasan Dan Kualitas Laporan Keuangan.

Abstract

This study aims to determine the effect system of local government finance local government financial statements, the dependent variable in this study is the quality of financial reports while the independent variable in this study is the effect system of local government. The population in this study are employees or staff who are in the Department of Highways in Sumbar. While the methods of analysis used in this study is the linear regression analysis and the coefficient of determination at a significance level of 5%. Programs used in analyzing the data using the of SPSS version 20. As for the comparison of results with t_{table} t_{count} , showing the results of 9,166 t and 2,059 t_{table} . From the results of these tests $t < t_{table}$ ie ($9,166 > 2,059$) which means H_a H_o is accepted or rejected. In other words, based on hypothesis testing shows that the effect system of local government affect the quality of local government financial reports.

Keywords: *the effect system of local government of the quality of local government financial reports.*

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Dalam PP No. 71 Tahun 2010, Laporan Keuangan merupakan media bagi suatu entitas dalam hal ini pemerintah untuk mempertanggung jawabkan kinerja keuangannya kepada publik. Menurut Harahap (2016:105) Kualitas laporan keuangan merupakan suatu informasi yang dapat memudahkan pengguna dan pembaca untuk memahami dan dapat diasumsikan dalam pengetahuan yang memadai tentang suatu aktifitas ekonomi, bisnis, akuntansi serta dapat mempelajari informasi dengan ketekunan yang wajar. Pemerintah harus mampu menyajikan laporan keuangan yang mengandung informasi keuangan yang berkualitas. Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dijelaskan bahwa laporan keuangan berkualitas itu memenuhi karakteristik : Relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) menyatakan bahwa pemerintah menyusun laporan keuangan dalam bentuk prinsip – prinsip akuntansi dan menyajikan laporan keuangan daerah yang berkualitas di butuhkan Sumber Daya Manusia yang memahami dan kompeten dalam akuntansi pemerintahan keuangan daerah bahkan organisasional tentang pemerintahan.

Menurut PSAK No.1 Tahun 2018 Laporan keuangan adalah penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Menurut Sarjono (2013) Salah satu indikator keberhasilan instansi pemerintah dalam mengelola keuangannya adalah mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan berdasarkan empat kriteria, yaitu kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektivitas Sistem Pengendalian Intern. Oleh karena itu, kualitas laporan keuangan keuangan pemerintah daerah tidak hanya diukur dari kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), tetapi juga dari efektifitas fungsi pengawasannya .

Dalam penelitian terdahulu, penulis mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian penulis. Berikut merupakan perbedaan penelitian terdahulu berupa jurnal terkait yang dilakukan penulis: Dianne Natalia (2018) menggunakan variabel Akuntansi Berbasis Akrua dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan, disini dianne natalia hanya menggunakan uji Analisis regresi linier berganda, korelasi dan determinasi . Wawan Sukmana dan Lia Anggarsari (2014) menggunakan variabel Pengawasan Intern, Pelaksanaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Kinerja Pemerintah Daerah, disini Wawan Sukmana dan Lia Anggarsari (2014) menguji variabel x yang sama tetapi terhadap kinerja keuangan. Vicky Agustiawan Lasoma (2013) menggunakan variabel Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, disini Vicky Agustiawan Lasoma hanya menguji variabel Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) terhadap Kualitas Laporan Keuangan, sedangkan penulis menggunakan 2 variabel

yaitu Penerapan SAP akrual dan efektivitas fungsi pengawasan terhadap kualitas laporan keuangan.

Berdasarkan masalah diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian karya ilmiah dengan judul: **“Pengaruh Efektivitas Fungsi Pengawasan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat ”**.

Berdasarkan latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan permasalahannya apakah pengaruh efektivitas fungsi pengawasan terhadap kualitas laporan keuangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat?

Tinjauan Pustaka

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Laporan keuangan merupakan suatu daftar finansial suatu entitas ekonomi yang disusun secara sistematis oleh akuntan pada akhir periode atau catatan yang memberikan informasi keuangan suatu perusahaan yang telah menjalankan perusahaan selama satu periode (biasanya satu tahun).

Menurut PSAK No.1 Tahun 2018 Laporan keuangan adalah penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Laporan keuangan pemerintah ditujukan untuk memenuhi tujuan umum pelaporan keuangan, namun tidak untuk memenuhi kebutuhan khusus pemakainya. Disamping penyusunan laporan keuangan bertujuan umum, entitas pelaporan dimungkinkan untuk menghasilkan laporan keuangan yang disusun untuk kebutuhan khusus.

Menurut Lillrank (dalam Nurillah, 2014:25) Laporan keuangan adalah catatan informasi suatu entitas pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja entitas tersebut. Laporan keuangan adalah suatu bentuk kebutuhan transparansi yang merupakan syarat pendukung adanya akuntabilitas yang berupa keterbukaan pemerintah atas aktivitas pengelolaan sumber daya publik (Mardiasmo, 2013)

Mardiasmo (2013:160) mengatakan bahwa lembaga pemerintah dituntut untuk dapat membuat laporan keuangan eksternal yang meliputi laporan keuangan formal seperti laporan surplus defisit, laporan realisasi anggaran, laporan arus kas dan neraca serta kinerja yang dinyatakan dalam ukuran finansial dan non finansial. Pelaporan keuangan dihasilkan dari proses akuntansi keuangan dan merupakan media untuk mengkomunikasikan informasi keuangan kepada pihak - pihak eksternal yang menaruh perhatian kepada badan atau organisasi pembuat laporan serta aktivitas-aktivitas.

Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah daerah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki.

1. Relevan

Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di

dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini dan memprediksi masa depan serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu.

2. Andal

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka pengguna informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan.

3. Dapat Dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas pemerintah akan menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik dari pada akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan.

4. Dapat Dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

Efektivitas Fungsi Pengawasan

Sistem akan dapat berjalan dengan baik apabila fungsi pengawasan organisasi efektif. Oleh sebab itu, maka perlu adanya suatu pengawasan dalam pengelolaan anggaran daerah agar semua proses berjalan dengan baik sehingga dapat menghasilkan kualitas laporan keuangan yang baik (Mardiasmo, 2013).

Pengertian Efektivitas

Efektivitas sebagai sistem nilai yang digunakan setiap organisasi (lembaga) untuk dapat mengukur keberhasilan (prestasi) dari suatu kegiatan yang dilakukan. Efektivitas secara etimologi berasal dari kata dasar *efektive* yang artinya berhasil, ditaati. Berikut ini kami kutip beberapa pengertian efektivitas, antara lain :

Menurut Halim A. (2014:164), bahwa Efektivitas merupakan suatu ukuran keberhasilan atau kegagalan dari organisasi dalam menggapai tujuan. Kemudian menurut Halim A. (2014:165), bahwa Efektivitas adalah suatu keadaan yang terjadi sebagai akibat yang dikehendaki. Kalau seseorang melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud tertentu dan memang dikehendakinya, maka orang itu dikatakan efektif bila menimbulkan akibat atau mempunyai maksud sebagaimana yang dikehendakinya.

Selanjutnya menurut Halim A. (2014:166), bahwa Efektivitas harus dinilai atas tujuan yang bisa dilaksanakan dan bukan atas konsep tujuan yang maksimum. Jadi efektivitas menurut ukuran seberapa jauh organisasi berhasil menggapai tujuan yang layak dicapai. Selain ketiga pendapat yang dikemukakan, pengertian efektivitas lebih khusus dan berhubungan dengan derajat keberhasilan pemerintah dalam hal urusan keuangan telah dikemukakan oleh Devas., dkk. (2013 : 43-44), bahwa efektivitas adalah hasil guna kegiatan pemerintah dalam mengurus keuangan daerah harus sedemikian rupa sehingga memungkinkan program dapat direncanakan dan dilaksanakan untuk mencapai tujuan pemerintah dengan biaya serendah-rendahnya dan dalam waktu yang secepat-cepatnya.

Pengertian Pengawasan

Pengawasan merupakan bagian dari fungsi manajemen yang khusus berupaya agar rencana yang sudah ditetapkan dapat tercapai sebagaimana mestinya. Berikut beberapa pendapat tentang pengertian pengawasan, antara lain : Menurut Harahap S.S. (2013:10), bahwa pengawasan mencakup upaya memeriksa apakah semua terjadi sesuai dengan rencana yang ditetapkan, perintah yang dikeluarkan, dan prinsip yang dianut. Juga dipakai untuk mengetahui kelemahan dan kelebihan agar dapat dihindari kejadiannya dikemudian hari.

Kemudian menurut Harahap S.S. (2013:11), bahwa yang dimaksud pengawasan (pengendalian) adalah tindakan pengaturan dan pengarahan pelaksanaan agar suatu tujuan tertentu dapat dicapai secara efektif dan efisien. Ciri-ciri utama pada pengawasan (pengendalian) adalah wewenang dan keterlibatan didalamnya. Selanjutnya menurut Harahap S.S. (2013 : 12), bahwa pengawasan yaitu suatu usaha meneliti kegiatan yang telah serta akan dilaksanakan. Pengawasan berorientasi pada objek yang dituju dan merupakan alat untuk menyuruh orang-orang bekerja menuju sasaran yang ingin dicapai.

Sedangkan menurut Williams C. (2014 : 273), bahwa pengawasan (pengontrolan) merupakan proses umum dari standar baku untuk mencapai tujuan organisasi. Membandingkan pelaksanaan aktual dengan standar-standar tersebut, dan mengambil tindakan perbaikan apabila diperlukan.

Merujuk pada beberapa pengertian pengawasan yang dikemukakan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa pengawasan merupakan segala kegiatan dan tindakan untuk menjamin agar penyelenggaraan suatu kegiatan tidak menyimpang dari rencana yang digariskan sebelumnya untuk mencapai tujuan. Artinya pengawasan dapat menjamin kesesuaian tindakan dengan rencana kepada pencapaian tujuan organisasi.

Pengukuran Efektivitas Fungsi Pengawasan

Berdasarkan PP RI No 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Efektivitas fungsi pengawasan dapat diukur menggunakan lima indikator yaitu :

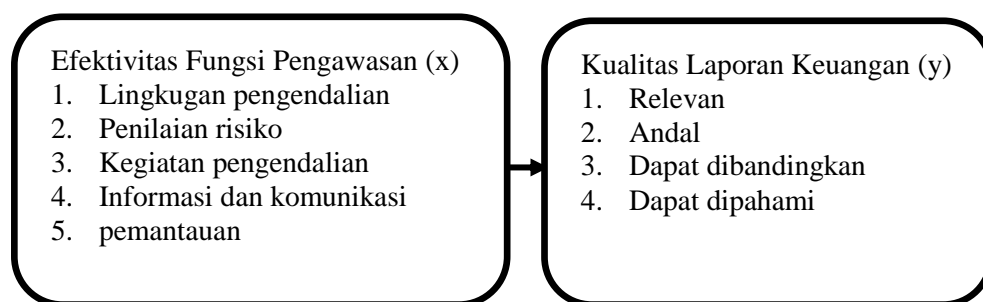
1. Lingkungan pengendalian

Pimpinan Instansi Pemerintah dan seluruh pegawai harus menciptakan dan memelihara lingkungan dalam keseluruhan organisasi yang menimbulkan perilaku positif dan mendukung terhadap pengendalian intern dan manajemen yang sehat.

2. Penilaian risiko
Pengendalian intern harus memberikan penilaian atas risiko yang dihadapi unit organisasi baik dari luar maupun dari dalam.
3. Kegiatan pengendalian
Kegiatan pengendalian membantu memastikan bahwa arahan pimpinan Instansi Pemerintah dilaksanakan. Kegiatan pengendalian harus efisien dan efektif dalam pencapaian tujuan organisasi.
4. Informasi dan komunikasi
Informasi harus dicatat dan dilaporkan kepada pimpinan Instansi Pemerintah dan pihak lain yang ditentukan. Informasi disajikan dalam suatu bentuk dan sarana tertentu serta tepat waktu sehingga memungkinkan pimpinan Instansi Pemerintah melaksanakan pengendalian dan tanggung jawabnya.
5. Pemantauan
Pemantauan harus dapat menilai kualitas kinerja dari waktu ke waktu dan memastikan bahwa rekomendasi hasil audit dan revidu lainnya dapat segera ditindaklanjuti.

Kerangka konseptual

Sesuai dengan permasalahan diatas, maka dibuatlah suatu susunan berupa kerangka konseptual sebagai berikut :



Gambar 1 Kerangka Pemikiran

Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kajian teori dan kerangka pemikiran diatas, maka hipotesis penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut. *H1: diduga terdapat pengaruh efektivitas fungsi pengawasan terhadap kualitas laporan keuangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat*

METODOLOGI PENELITIAN

Sejarah Singkat Lokasi Penelitian

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat merupakan gabungan dari dua Dinas, yaitu Dinas Prasarana Jalan dengan Dinas Tata Ruang dan Permukiman. Gabungan ke dua Dinas tersebut dimulai sejak tahun 2008 dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No. 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Barat, semenjak tahun 2017 dinas ini dipisah kembali dengan dinas Permukiman sehingga hanya menjadi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat.

Metode Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan melalui metode angket, yaitu menyebarkan daftar pertanyaan (kuesioner) yang akan diisi atau dijawab oleh responden yang merupakan karyawan atau staf di bagian keuangan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat. pada tahun 2020. Menurut Kusumah (2014:78) Kuesioner adalah daftar pertanyaan tertulis yang diberikan kepada subjek yang diteliti untuk mengumpulkan informasi yang dibutuhkan.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan dilakukan dalam penelitian ini dapat berupa:

1. Data Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Metode ini merupakan metode pengumpulan data dengan cara melakukan penelitian secara langsung pada objek penelitian

2. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Metode ini merupakan teknik pengumpulan data dengan riset pustaka yang memanfaatkan teori-teori dan pendapat para tokoh dalam buku-buku ilmiah, majalah artikel dan bacaan-bacaan lainnya yang berkaitan dengan penelitian.

Jenis dan Sumber Data

Jenis Data

Menurut Sugiyono, (2013:14) terdapat beberapa jenis penelitian antara lain:

1. Penelitian kuantitatif, adalah penelitian dengan memperoleh data yang berbentuk angka atau data kualitatif yang diangkakan.
2. Penelitian kualitatif, data kualitatif adalah data yang berbentuk kata, skema, dan gambar.

Berdasarkan pendapat di atas penelitian yang dilakukan yaitu penelitian kuantitatif berupa data angka atau data kualitatif yang diangkakan. yang akan diolah dengan menggunakan SPSS.

Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Data Primer yaitu berupa kuesioner yang digunakan untuk mengetahui Pengaruh Efektivitas Fungsi Pengawasan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat. Kuesioner diadopsi dari penelitian terdahulu yaitu dianne natalia (2018)

Populasi dan Sampel

1. Populasi merupakan suatu kelompok yang terdiri dari objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan (Sugiyono,2010:7). Populasi dalam penelitian ini seluruh pegawai bagian keuangan dinas pekerjaan umum dan penataan ruang provinsi sumatera barat yang berjumlah 30 orang
2. Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti, menurut Sugiyono (2013) sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Untuk menentukan sampel yang digunakan dalam penelitian, penulis menggunakan metode Total Sampling yang menurut sugiyono (2013) merupakan teknik untuk menentukan sampel penelitian dimana jumlah sampel

sama dengan populasi. maka pemilihan sampel penelitian berdasarkan penentuan regulasi sebanyak 30 orang yaitu bagian keuangan dan pembantu bendahara pengeluaran dinas pekerjaan umum dan penataan ruang provinsi Sumatera Barat.

Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Seperti diketahui bahwa uji t dan F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Kalau asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil. Ada dua cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan analisis grafik dan uji statistik. Untuk menguji apakah data berdistribusi normal atau tidak dilakukan uji statistik Kolmogorov-Smirnov Test. Residual berdistribusi normal jika memiliki nilai signifikansi $>0,05$ (Imam Ghazali, 2011: 160-165).

2. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika variance dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain tetap maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Menurut Ghazali (2013:139) salah satu cara untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas adalah dengan melakukan uji Gletser. Uji Gletser yaitu meregres nilai absolut residual terhadap variabel independen. Hasil probabilitas dikatakan signifikan jika nilai signifikannya di atas tingkat kepercayaan 0,05.

Metode analisis

Untuk memudahkan dalam analisis dan pembahasan penelitian ini maka dalam seluruh pengolahan data di bawah ini digunakan program SPSS versi 20 (Agussalim Manguluang, 2015). Untuk menjawab permasalahan yang dikemukakan penulis di atas maka penulis menggunakan analisis regresi linear sederhana. Analisis ini digunakan untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen (X) dan variabel dependen (Y). Rumus regresi linear sederhana adalah sebagai berikut: $Y = a + bX + e$

1. Analisis Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel bebas menentukan variasi perubahan variabel terikat (Arikunto, 2013). Atau dapat juga dikatakan sejauh mana seluruh variabel bebas mampu menjelaskan atau berkontribusi terhadap variabel terikatnya. Koefisien determinasi adalah koefisien korelasi yang dikuadratkan (r^2) dengan formula:

$$KD = r^2 \times 100\%$$

2. Pengujian Hipotesis

Nilai t-tabel pada tabel distribusi student ditentukan dengan rumus $t_{(\alpha/2);(N-k-1)}$ dengan kriteria pengujian hipotesis. H_0 ditolak dan H_a diterima apabila t-hitung \geq t-tabel atau Sig (prob) $< \alpha = 5\%$, hal ini berarti variabel X berpengaruh signifikan terhadap variabel Y. H_0 diterima dan H_a ditolak apabila t-hitung $<$ t-tabel atau Sig (prob) $\geq \alpha = 5\%$, hal ini berarti variabel X tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel Y.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Analisis Deskriptif

Penelitian ini mengambil hasil tanggapan responden yang diteliti adalah pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Propinsi Sumatera Barat, dengan sampel sebanyak 30 orang, maka responden dikelompokkan atas empat kelompok yaitu pegawai berdasarkan jenis kelamin, berdasarkan usia, berdasarkan pendidikan dan berdasarkan golongan, dimana penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data dengan menyebarkan kuesioner yang diolah dengan bantuan software SPSS Versi 20.

Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal ataukah tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Dasar pengambilan keputusan dalam uji normalitas yakni jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, nilai ini diambil pada hasil uji normalitas menggunakan SPSS versi 20.

Tabel 1 Hasil Uji Normalitas

		Unstandardized Residual
N		30
Normal Parameters ^{a,b}	0E-7	0E-7
	.67330725	.67330725
Most Extreme Differences	.148	.148
	.088	.088
	-.148	-.148
Kolmogorov-Smirnov Z		.810
Asymp. Sig. (2-tailed)		.528

Sumber : Data Hasil Olahan SPSS v20

2. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Menurut Ghozali (2013:139) salah satu cara untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas adalah dengan melakukan uji gletser. Uji Gletser yaitu meregres nilai absolut residual terhadap variable independen. Jika nilai signifikansi antara variabel independen dengan absolut residual diatas tingkat kepercayaan 0,05 maka dikatakan tidak terjadi masalah heteroskedastisitas. Hasil uji heteroskedastisitas pada penelitian ini dapat dilihat pada gambar 2 berikut

Tabel 2 Hasil Uji Heteroskedastisitas
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	1.798	2.401		.749	.462
X	.001	.062	.004	.021	.984

Sumber : Data Hasil Olahan SPSS v20

Dari tabel 2 di atas dapat disimpulkan bahwa nilai signifikansi pada variable independen lebih 0,05 Sehingga tidak terjadi heteroskedastisitas.

Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi pada regresi linear sering diartikan sebagai seberapa besar kemampuan semua variabel bebas dalam menjelaskan varians dari variabel terikatnya. Nilai koefisien determinasi dapat dilihat pada tabel 3 berikut ini :

Tabel 3 Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.947	.896	.888	.69780

Sumber: Data yang Diolah Dengan SPSS v20

Berdasarkan tabel 3 nilai koefisien determinasi ditunjukkan oleh nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,888. Hal ini berarti kontribusi variabel Efektivitas fungsi pengawasan berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan adalah sebesar 88,8%. Sedangkan sisanya sebesar 12,2% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini, seperti lingkungan kerja, kepemimpinan dan variabel lainnya.

Uji Hipotesis dan Pembahasan

Hipotesis

Pengujian Hipotesis Penelitian Secara Parsial (Uji t), dimana Uji hipotesis digunakan untuk mengetahui apakah hipotesis diterima atau ditolak. Untuk mengajukan pengujian secara parsial tentang pengaruh variabel efektivitas fungsi pengawasan terhadap kualitas laporan keuangan. maka dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 4 Hasil Uji t

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	2.116	4.113		.515	.612
	X	.966	.105	.886	9.166	.000

Sumber : Data Hasil Olahan SPSS v20

Dari tabel 4 diatas tersebut memperlihatkan nilai koefisien regresi (t hitung) untuk masing-masing variabel bebas adalah sebagai berikut:

Nilai koefisien regresi (beta) variabel efektivitas fungsi pengawasan adalah 0,966 dengan tingkat signifikansi 0,886. Nilai Thitung 9,166 dan Ttabel 2,059 ($9,166 > 2,059$) atau tingkat signifikansi lebih kecil dari alpha ($0,000 < 0,05$), H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya secara parsial pengaruh efektivitas fungsi pengawasan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Propinsi Sumatera Barat.

KESIMPULAN DAN SARAN

Bab penutup merupakan bagian terakhir dari penelitian ini, yang terdiri dari kesimpulan hasil penelitian dan saran yang dapat disampaikan berdasarkan hasil penelitian adalah sebagai berikut:

Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah dan analisa data yang telah dianalisis, maka dapat dikemukakan beberapa kesimpulan hasil pengujian hipotesa pada tabel 4.6 menyatakan hasil temuan sebagai berikut: Variabel efektivitas fungsi pengawasan

berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan dengan nilai $T_{hitung} > T_{tabel}$ ($9,166 > 2,059$) atau tingkat signifikansi lebih kecil dari α ($0,000 < 0,05$), H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya secara parsial pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual terhadap kinerja keuangan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Propinsi Sumatera Barat. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Propinsi Sumatera Barat

Saran

1. Pentingnya sumber daya manusia juga menjadi hal yang perlu diperhatikan, karna SDM yang berkualitas dan kompeten sangat dibutuhkan agar mampu bekerja lebih baik dengan adanya standar akuntansi pemerintah yang diterapkan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Propinsi Sumatera Barat.
2. Dengan hasil penelitian ini hendaknya pihak Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Propinsi Sumatera Barat mengambil kebijakan upaya peningkatan kualitas laporan keuangan sehingga mendapatkan hasil audit yang maksimal oleh BPK.
3. Diharapkan bagi peneliti selanjutnya untuk menambah variasi variabel yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan agar menambah wawasan.
4. Efektivitas Fungsi Pengawasan lebih diperketat terhadap pegawai

DAFTAR PUSTAKA

- Agussalim Manguluang, 2015. *Statistik Lanjutan*, Ekasakti Press, Padang
- Arikunto, Surhasimi. 2013. *metodelogi penelitian*. Bina Agsara. Yogyakarta
- Assyifa Nurillah, 2014, Pengaruh Kompetensi SDM, Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Daerah, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Intern terhadap kualitas laporan keuangan
- Dianne Natalia, 2018. Pengaruh Akuntansi Berbasis Akrual dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Biro Keuangan Setda Provinsi Jawa Barat, *Skripsi*, Universitas Komputer Indonesia.
- Dimas Satria Wibawa, 2016. Pengaruh Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Dan Efektivitas Fungsi Pengawasan Terhadap Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Daerah Kota Tegal. *Jurnal Universitas Jendral Sudirman, Vol. 4 No. 1. 151-168*
- Ghozali, Imam. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM. SPSS 19 (edisi kelima.)* Semarang: Universitas Diponegoro.
- Halim, Abdul. 2014. *Akuntansi Keuangan Daerah*, Saleba Empat, Jakarta. Pengelolaan Keuangan Daerah, *Seri Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah*, UPP STIM YKPN, Yogyakarta.
- Harahap, S.S. 2013. *Manajemen Keuangan Daerah*, Edisi Revisi, Penerbit BPFE, Yogyakarta

- Mardiasmo, 2013. Akuntansi Sektor Publik Edisi Pertama. Yogyakarta
- Munir, Dasril, Tangkilisan. 2014, *Kebijakan dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta, YPAPI
- Muthi Risla, 2016, Pengaruh Pengawasan Intern Dan Pelaksanaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Daerah
- Neni Rahmawati, 2018, Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual di Sekretariat DPRD Kabupaten Malang berdasarkan PP No.71 th 2010
- PP. RI No.71 Tahun 2010. *Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*, Jakarta
- PP RI No. 60 Tahun 2008. *Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah*, Jakarta
- PSAK No.1 Tahun 2015. *Tentang Penyajian Laporan Keuangan*, Jakarta
- Sarjono, 2013. Penilaian Kinerja Keuangan, *Jurnal Akuntansi*, Vol. 3 No. 2 hal. 176-188
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung. Pusat Bahasa Depdiknas.
- Sumarjo, Hendro., 2018. Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, Skripsi, Universitas Sebelas Maret, Surakarta Penerbit UPP STIM YKPN, Yogyakarta.
- Titik setyaningsih, 2016, studi eksplorasi tingkat pemeahaman aparatur pemerintah daerah dan anggota dprd terhadap standar akuntansi akrual di pemerintah kota Surakarta
- Vicky Agustawan Lasoma, 2018. Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) terhadap Kualitass Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal STIE Semarang*. Vol. 5 No.3 hal 201-214.
- Yuliani , 2016, Pengaruh Pengetahuan Akuntansi, Pemanfaatan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Peran Internal Audit Terhadap Kualitas laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Kota Banda Aceh). *Jurnal telaah dan riset akuntansi Vol 3 No 2 hal 206-220*.
- Williams C. 2014. *Manajemen*, Edisi Pertama. Penerbit Salemba Empat, Jakarta.